

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN KESEHATAN  
TERHADAP PENERAPAN KAMAR RAWAT INAP STANDAR DI RUMAH SAKIT  
KH.DAUD ARIF KUALA TUNGKAL TANJUNG JABUNG BARAT**

***EXSECUTIVE SUMMARY***



**OLEH:**

**PUTRI ANDAYANI SYAM**  
**NPM. 2110018412042**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

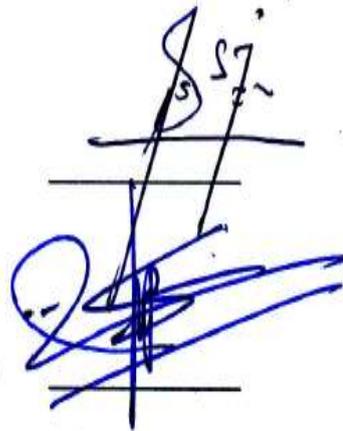
No. Reg.: 006/MH/Kes/84/IX-2025

Nama : Putri Andayani Syam  
NPM : 2110018412042  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan Terhadap Penerapan Kamar Rawat Inap Standar di Rumah Sakit Daud Arif Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Lis Febrianda., S.H., M.Hum (Pembimbing I)

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H. (Pembimbing II)



# IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN KESEHATAN TERHADAP PENERAPAN KAMAR RAWAT INAP STANDAR DI RUMAH SAKIT KH.DAUD ARIF KUALA TUNGKAL TANJUNG JABUNG BARAT

Putri Andayani Syam<sup>1</sup>, Lis Febrianda<sup>1</sup>, Sanidjar Pebrihariati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University  
Email: putriandayani1278@gmail.com

## ABSTRACT

The government implements the Standard Inpatient Class (KRIS) policy through Government Regulation Number 47 of 2021. At Daud Arif Regional Hospital in Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, it was found that there are inconsistencies between the inpatient room services and the established standards in the implementation of the Standard Inpatient Class (KRIS). The problem formulation in this research is: 1) How is the implementation of Presidential Regulation Number 59 of 2024 concerning Health Insurance related to the application of standard inpatient rooms at Daud Arif Hospital in Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat? 2) What are the obstacles in the implementation of Standard Inpatient Rooms at KH. Daud Arif Hospital? And 3) What efforts are being made by RSUD KH. Daud Arif in implementing the Standard Inpatient Rooms at KH. Daud Arif Hospital in Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat? The type of research is conducted through empirical research (Socio-Legal Research). Primary data sources are obtained from interviews with informants and Secondary data is obtained from document studies. The data analysis technique is descriptive qualitative of the data obtained in the field. With the results: 1) The number of inpatient beds at RSUD KH. Daud Arif is 124 beds, with several inpatient units still combining several types of services, for example, lung patients combined with internal diseases and eye patients with surgical patients; 2) The failure to form a rapid implementation team for KRIS, coordination between units is not yet optimal, and the inventory of facilities related to KRIS implementation has not been conducted comprehensively; and 3) an urgent need to form a rapid team, conduct an inventory of inpatient facility rooms, and improve infrastructure to meet standards.

**Keywords: Implementation, Health Insurance, Standard Inpatient Rooms, and Hospitals.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin yang dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, pembentukan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Dengan demikian pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan khususnya dalam bidang kesehatan terhadap masyarakat (Dwi Chresna Purwaningsih dkk, 2024).

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi sosial meliputi beberapa aspek, yaitu kegotongroyongan antar golongan, antara yang tua dan muda, yang kaya dan miskin, dan seterusnya; kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan; dan bersifat nirlaba. Kemudian, prinsip ekuitas didefinisikan sebagai kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak berkaitan dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya (Shaina Naurah Aziza, dkk, 2024).

Berdasarkan pra penelitian yang telah penulis lakukan di RSUD Daud Arif Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat ditemukan bahwa terkait pelayanan

penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) masih terdapat ketidaksesuaian antara pelayanan rawat inap yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan (Hasil Wawancara dengan Febrianingsih, perawat di RSUD Daud Arif Kuala Tungkal, 2024).

Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah belum terdapatnya ruangan untuk rawat inap standar bagi pasien penyakit paru, hal ini mengakibatkan pasien tersebut terpaksa ditempatkan satu ruangan dengan pasien penyakit dalam. (Wawancara dengan Yuliana, perawat di RSUD Daud Arif Kuala Tungkal, 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul: **IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN KESEHATAN TERHADAP PENERAPAN KAMAR RAWAT INAP STANDAR DI K.H RSUD DAUD ARIF KUALA TUNGKAL TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI.**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan yang dapat ditarik antara lain:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan terhadap penerapan kamar rawat inap standar di Rumah Sakit KH. Daud Arif Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
2. Kendala-kendala apa saja dalam penerapan kamar rawat inap standar di Rumah Sakit KH. Daud Arif Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh RSUD K.H Daud Arif dalam penerapan Kamar Rawat Inap Standar di Rumah Sakit KH. Daud Arif Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun

2024 tentang Jaminan Kesehatan terhadap Penerapan Kamar Rawat Inap Standar di Rumah Sakit Daud Arif Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemukan dalam Penerapan Kamar Rawat Inap Standar di Rumah Sakit Daud Arif Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh RSUD K.H Daud Arif dalam Penerapan Kamar Rawat Inap Standar di RSUD K.H Daud Arif Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis (*Socio-Legal Research*) yaitu identifikasi hukum dengan efektifitas hukum. Penelitian ini memiliki makna untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang ada dibalik penegakan hukum (Amiruddin dan Zainal Asikrin, 2016). Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, wawancara mendalam dan observasi. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Terhadap Penerapan Kamar Rawat Inap Standar Di Rumah Sakit KH.Daud Arif Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat.**

1. Fasilitas Rawat Inap RSUD KH. Daud Arif



1. Perbaikan Fasilitas Rawat Inap
2. Penguatan Kapasitas SDM
3. Pembentukan Tim Percepatan
4. Penambahan Anggaran dan Perbaikan Infrastruktur
5. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

Implementasi Perpres No. 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan di RSUD KH. Daud Arif Tanjung Jabung Barat masih menghadapi tantangan berupa fasilitas rawat inap yang belum sesuai standar KRIS, pemanfaatan ruang JKN yang belum maksimal, serta keterbatasan SDM, anggaran, dan dukungan pemerintah daerah. Untuk mengatasinya, rumah sakit melakukan perbaikan fasilitas, penguatan SDM, pembentukan tim percepatan, penambahan anggaran, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan setempat

##### B. Saran

Untuk mendukung penerapan Kamar Rawat Inap Standar di RSUD K.H. Daud Arif Kuala Tungkal, diperlukan perhatian dan fasilitasi dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan terkait sarana dan prasarana, proaktivitas pimpinan dan staf rumah sakit dalam mengambil kebijakan serta meningkatkan koordinasi dan kualitas pelayanan, serta dukungan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar pelayanan kesehatan dapat terselenggara secara optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-Buku

W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka,

Jakarta.

##### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.

##### C. Sumber Lain

Raina Nismara, "Implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2024: Kesiapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS-JKN) di Rumah Sakit", Artikel: Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih pada:

1. Ibu Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum. (Pembimbing I).
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H (Pembimbing II) sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramdhani, S.H., M.H. Kaprodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmunya.
5. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.